



um
The Learning
University

FACULTY OF EDUCATION
STATE UNIVERSITY OF MALANG



Certificate

Nomor : 3895/UN.32.1/TU/2012

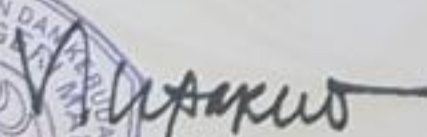
Awarded to

Priadi Surya, M. Pd


as

Participant

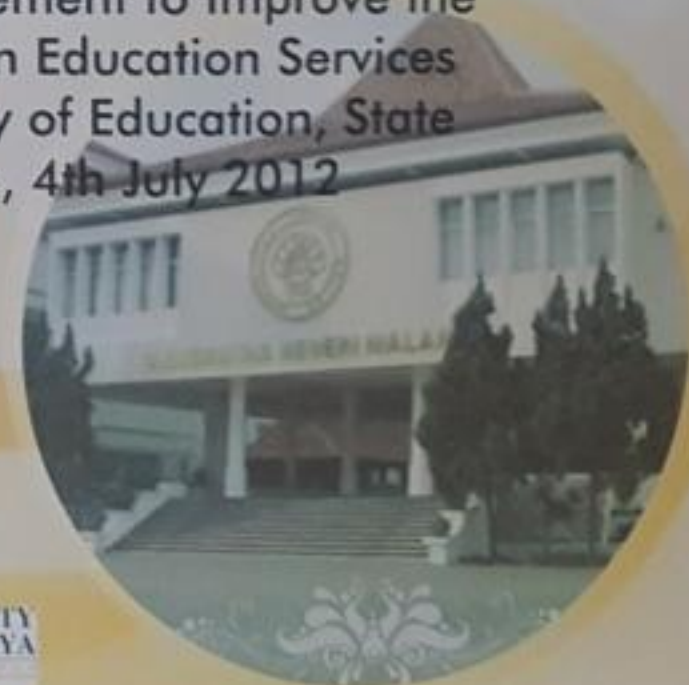
in the 4th International Conference on Educational Management Administration and Leadership (ICEMAL), on the theme Strengthening Educational Management to Improve the Availability, Affordability, Quality, Relevance, Equality and Assurance in Education Services Gaining, organized by Educational Administration department, Faculty of Education, State University of Malang, in Royal Orchid Garden hotel Batu-Malang, 4th July 2012



Prof. Dr. H. Suparno
Rector, UM



Prof. Dr. H. Supriyono, M.Pd
Dean, Faculty of Education





SURAT IJIN / PENUGASAN

Nomor : *1277* /UN34.11/PM/2012

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta mengijinkan/menugaskan kepada :

No.	Nama	NIP	Pangkat. Gol
1.	Tatang M. Amirin, M.Si.	19500920 198703 1 002	Pemb. Utm. Muda, IV/c/Lektor Kep.
2.	MM. Wahyuningrum, MM.	19571021 198403 2 001	Penata Tk. I, III/d/Lektor
3.	Dr. Udik Budi Wibowo, M.Pd.	19610614 198702 1 001	Penata, III/c/Lektor
4.	Setya Raharja, M.Pd.	19651110 199702 1 001	Penata Tk. I, III/d/Lektor
5.	Dr. Cepi Safrudin Abdul Djabar	19740831 199903 1 002	Penata, III/c/Lektor
6.	Mada Sutapa, M.Si.	19731008 198802 1 001	Penata Muda, III/a/Asisten Ahli
7.	Nurtanio Agus Purwanto, M.Pd.	19760807 200112 1 006	Penata Tk. I, III/d/Lektor
8.	Slamet Lestari, M.Pd.	19770627 200212 1 006	Penata Muda Tk. I, III/b/Asisten Ahli
9.	Lia Yuliana, M.Pd.	19810717 200501 2 004	Penata, III/c/Lektor
10.	Rahmania Utari, M.Pd.	19820918 200501 2 001	Penata Muda, III/a/Lektor
11	Priadi Surya, M.Pd.	19811111 200912 1 001	Penata Muda Tk. I, III/b/Asisten Ahli

Jurusan : Administrasi Pendidikan (AP)
Lembaga : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
Keperluan : Sebagai Peserta International Cenferece on Educational Management/Administration and Leadership (ICEMAL) Tahun 2012
Tempat : Hotel Royal Orchid Garden, Batu, Malang
Waktu : Rabu s.d. Jum'at, tanggal 4 s.d. 6 Juli 2012
Keterangan : Berdasarkan surat dari Ketua Jurusan AP FIP UNY Nomor : 48/UN34.11/AP/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012

Surat ijin ini diberikan untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan setelah selesai agar melaporkan hasilnya kepada Dekan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Yogyakarta, 26 Juni 2012
Dekan

Dr. Haryanto, M.Pd.
NIP. 19600902 198702 1 001

- Tembusan :
1. Rektor (sebagai laporan)
 2. Wakil Dekan I FIP UNY
 3. Kajur AP FIP UNY
 4. Kasubag. Keu. & Akt. FIP
 5. Sekretariat ISO FIP Universitas Negeri Yogyakarta



um
The Learning
University

FACULTY OF EDUCATION STATE UNIVERSITY OF MALANG



Certificate

Nomor : 3895/UN.32.1/TU/2012

Awarded to

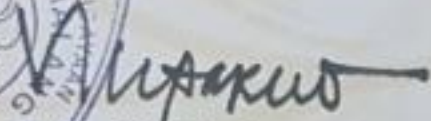
Priadi Surya

as


Speaker

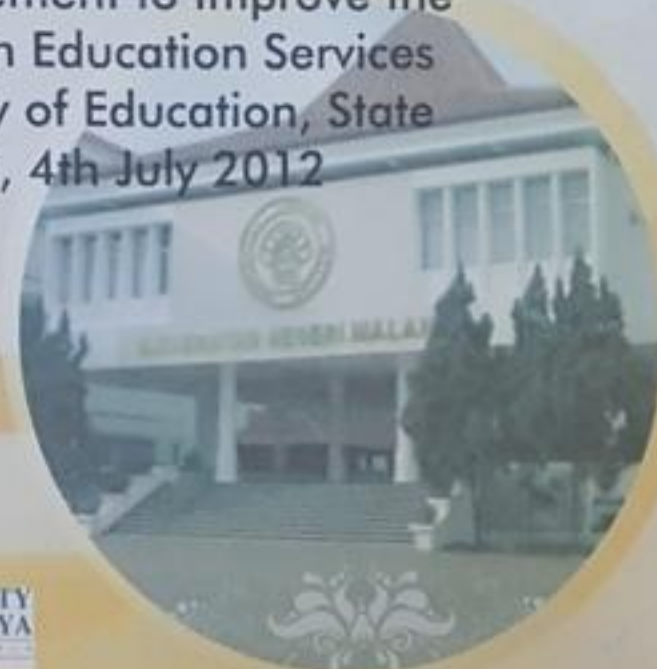
in the 4th International Conference on Educational Management Administration and Leadership (ICEMAL), on the theme Strengthening Educational Management to Improve the Availability, Affordability, Quality, Relevance, Equality and Assurance in Education Services Gaining, organized by Educational Administration department, Faculty of Education, State University of Malang, in Royal Orchid Garden hotel Batu-Malang, 4th July 2012




Prof. Dr. H. Suparno
Rector, UM




Prof. Dr. H. Supriyono, M.Pd
Dean, Faculty of Education



PEMETAAN PENDIDIKAN (*EDUCATION MAPPING*) SEBAGAI DASAR MENINGKATKAN LAYANAN PENDIDIKAN¹

Priadi Surya
Universitas Negeri Yogyakarta
priadisurya@uny.ac.id

Abstract

Education mapping is a developmented concept of school mapping. This paper is describe the education mapping as a considerant of policy making in education. Literature study is used to describe it. The conclusion, education mapping is giving the data and information as a policy making support which based on the educational-regional aspects. The policy is made to raise the education service for citizens.

Keywords: *education mapping, school mapping, education service, policy making.*

PENDAHULUAN

Perumusan kebijakan pendidikan seyogyanya berdasar kepada hasil-hasil penelitian yang mengungkap fakta kebutuhan di wilayahnya. Data yang diperoleh diolah untuk memberikan informasi yang sah bagi pembuat kebijakan. Harapannya kebijakan pendidikan yang digulirkan merupakan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Data pendidikan yang diperoleh dari berbagai wilayah, dapat dituangkan dalam suatu peta pendidikan. Data yang ada dapat ditampilkan dalam bentuk tabel maupun gambar peta. Dari tabel dan peta inilah dapat kita ketahui persebaran kualitas pendidikan di suatu wilayah.

Pemerintah masih belum mengoptimalkan penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan. Balitbangdikbud (2011) pun mengakuinya. “*Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini banyak kebijakan pendidikan yang kurang tepat sehingga sulit dalam pelaksanaannya. Salah satu sebab dari kondisi tersebut adalah kurang kuatnya suatu kebijakan yang dibuat atas dukungan hasil-hasil penelitian.*” Hal ini juga diutarakan Sofian Effendi (2011) bahwa “*Kebijakan pemerintah yang cenderung reaktif dan dirumuskan tidak untuk memecahkan masalah jangka panjang. Padahal Indonesia membutuhkan perubahan strategi*

¹ Makalah ICEMAL (*International Conference Educational Management, Administration and Leadership*), 4-5 Juli 2012 di Malang, Jawa Timur, Indonesia.

pendidikan 20-30 tahun ke depan.” Agaknya kebijakan pendidikan sebagai upaya memenuhi hak warga negara haruslah berdasarkan data, fakta, dan kebutuhan nyata di lapangan. Sungguh ideal pula jika kebijakan itu benar-benar berdasarkan kemandirian dan kemerdekaan bangsa Indonesia sendiri, tidak atas tekanan negara dan kepentingan asing.

Pemetaan pendidikan merupakan salah satu penyuplai informasi yang berguna bagi pembuatan keputusan. Gambaran nyata dari suatu kondisi di wilayah tertentu, menjadi titik tolak pembangunan pendidikan kita. Secara jangka panjang, kebijakan yang dihasilkan ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, mutu, relevansi, kesetaraan, dan kepastian dalam memperoleh layanan pendidikan di Indonesia.

Betapapun sulitnya dan betapa mahalnyanya layanan pendidikan yang dapat menjangkau seluruh warga negara, pendidikan harus tetap dipandang sebagai kewajiban negara untuk memenuhinya. Kekhawatiran minimnya peran negara dalam penyediaan layanan pendidikan ini muncul pula dalam Hasil Rumusan dan Rekomendasi Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Tahun 2012 di Yogyakarta pada tanggal 7-8 Mei 2012.

Pendidikan telah menjadi barang mewah, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pendidikan telah beralih dari public goods (kebutuhan publik yang menjadi tanggung jawab negara) ke private goods (kebutuhan pribadi), sehingga pendidikan telah berubah menjadi lahan bisnis. Pendidikan menjadi pencetak manusia yang dibutuhkan pasar dan ini pun gagal karena pasar ternyata tidak mampu menyerap mereka sehingga angka pengangguran selalu meningkat dari waktu ke waktu.

Penulis mengungkapkan gagasan sederhana mengenai pentingnya pemetaan pendidikan sebagai dasar untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi warga negara. Penulis juga mengajak kita untuk berdiskusi dengan memandang administrasi pendidikan secara luas disumbang oleh berbagai ilmu lainnya.

PEMBAHASAN

Model Perkuliahan “Kajian Mandiri *School Mapping*”

Model perkuliahan “Kajian Mandiri *School Mapping*” diterapkan pada mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2009 Kelas A Semester Gasal Tahun Akademik 2011/2012 melalui mata kuliah dasar kependidikan Manajemen Pendidikan (MDK 221) dengan dosen pengampu Priadi Surya, M.Pd dari Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY.

Pada awal perkuliahan, penulis sebagai dosen pengampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa keilmuan manajemen pendidikan merupakan ilmu terapan yang disokong oleh ilmu-ilmu lainnya termasuk geografi dan pendidikan geografi.

Penulis berasumsi bahwa mahasiswa Pendidikan Geografi semester lima sudah memiliki kompetensi dasar maupun lanjut mengenai ilmu geografi dan pendidikan geografi. Penulis memanfaatkan potensi itu untuk menghubungkannya dengan ilmu administrasi pendidikan dalam perkuliahan Manajemen Pendidikan.

Desain perkuliahan MDK 221 Manajemen Pendidikan pada Pendidikan Geografi dirancang dengan metode ceramah, presentasi kelompok dan diskusi kelas dengan tema-tema yang sudah dibagi, serta tugas individu dalam hal ini makalah “Kajian Mandiri *School Mapping*”. Mahasiswa diberi tahu pada awal perkuliahan mengenai tugas individu ini harus dikumpulkan di pertemuan/tatap muka perkuliahan terakhir.

Penjelasan tentang *school mapping* diberikan di awal-awal perkuliahan. Meskipun memakai istilah *school mapping* yang artinya pemetaan sekolah, namun sesungguhnya pembahasan pemetaan ini tidak terbatas kepada sekolah saja. Oleh karena penulis mengusulkan gagasan *education mapping* atau pemetaan pendidikan. Adapun isi atau materi apa yang hendak dipetakan dipelajari bersama seiring berjalannya presentasi kelompok dan diskusi kelas. Sejak awal perkuliahan hingga batas waktu pengumpulan tugas individu “Kajian Mandiri *School Mapping*”, mahasiswa diperkenankan untuk berkonsultasi dengan dosen pengampu.

Pada waktu pengumpulan tugas “Kajian Mandiri *School Mapping*” yang telah ditentukan, mahasiswa mengumpulkan tugasnya sebagai salah satu unsur penilaian selain ujian tengah semester dan ujian akhir semester. “Kajian Mandiri

School Mapping” karya mahasiswa tersebut terdiri dari beragam aspek geografi dan administrasi pendidikan. (lihat Tabel 1).

Tabel 1
 “Kajian Mandiri *School Mapping*” Mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2009 Kelas A Semester Gasal Tahun Akademik 2011/2012

No.	Nama Mahasiswa & Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dwi Wahyuni <i>Pengaruh Lokasi Madrasah Ibtidaiyah Sananul Ula Daraman Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta terhadap Minat Calon Peserta Didik</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan fisik sekolah yang menunjang meliputi, <i>pertama</i> topografi lahan cenderung datar dan tidak bertebing sangat tepat untuk dibangun gedung sekolah. <i>Kedua</i>, bentuk lahan mendekati persegi empat sehingga terlihat teratur dan mudah untuk ditata ruangnya. <i>Ketiga</i>, luas lahan yang cukup luas dan memiliki lahan upacara. <i>Keempat</i>, kondisi tanah bekas kebun tidak bermasalah untuk dibangun gedung sekolah. <i>Kelima</i>, lokasi sekolah yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dengan pasar cukup efektif dalam penyebaran informasi oleh para ibu rumah tangga. <i>Keenam</i>, tersedianya transportasi dan kondisi jalan yang sangat baik memudahkan pencapaian ke lokasi sekolah. 2. Lingkungan sosial sekolah yang menunjang adalah, <i>pertama</i>, terhindar dari kegiatan masyarakat yang negatif seperti tempat hiburan maupun asap pabrik. <i>Kedua</i>, lokasi sekolah dalam kawasan yang agamis.
2	Taufik Walinono <i>Analisis Lokasi dan Lingkungan pada Tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik lingkungan sekolah berbeda-beda. Perbedaan karakteristik menyebabkan sisi positif dan negatif yang berdampak pada pendidikan. Lingkungan sekitar sekolah dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran siswa secara langsung. 2. Prestasi belajar dipengaruhi kondisi lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang nyaman dan bersih mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, anak-anak menjadi lebih sehat dan berpikir secara jernih.
3	Nurmala Sari <i>Analisis Mutu Beberapa SMA di Kulon Progo</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Topografi yang berupa dataran rendah mendukung perkembangan sekolah berjalan baik. Sekolah yang terletak di pusat kota mudah dijangkau. Sekolah yang terletak tidak di pusat kota atau pinggiran kota meski mudah dijangkau tetapi tidak menjadi prioritas. Topografi yang berupa perbukitan dan pegunungan sulit dijangkau dan minim peminat. 2. Aksesibilitas pada sekolah di dataran rendah mudah dijangkau. Letak sekolah yang dekat dengan kota memudahkan mendapatkan apa yang dibutuhkan. Letak sekolah di pinggiran kota dan perbukitan serta pegunungan lebih sulit dijangkau. Terlebih jika jalan yang tidak rata membuat jarang peminat terhadap sekolah. 3. Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah terpengaruh oleh topografi dan aksesibilitasnya. Sekolah yang terletak di dataran rendah dan pusat kota cenderung memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Gedung sekolah,

- laboratorium, perpustakaan dengan buku yang lengkap tersedia di pusat kota. Sekolah dengan akses yang sulit menghambat kepemilikan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Ketersediaan guru profesional lebih banyak terdapat pada sekolah di lahan datar, aksesibilitas, sarana dan prasarana yang baik. Ketertarikan guru untuk bekerja ini disebabkan adanya dukungan hal-hal itu yang memudahkan dia mengajar. Sebaliknya di daerah bukan pusat kota, guru profesional tidak sebanyak di perkotaan.
 5. Sisi negatif dari letak sekolah di pusat kota atau pusat keramaian adalah suara bising kendaraan, kemacetan, dan sifat konsumerisme.
- 4 Wahyu Widiyatmoko
Penentuan Lokasi Pembangunan SMA/MA Baru di Wilayah Kabupaten Temanggung Bagian Utara
 1. Persebaran SMA/ sederajat di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah tidak merata. Lokasi sekolah SMA/ sederajat berpusat di Kecamatan Temanggung.
 2. Penentuan lokasi pembangunan sekolah SMA/ sederajat baru dapat dilakukan pada wilayah Temanggung utara. Tepatnya di Desa Lempuyang Kecamatan Candiroto. Hal ini karena banyak anak usia sekolah SMA di wilayah utara, dan akses ke wilayah ini juga tidak terlalu sulit, mudah dijangkau oleh lima kecamatan yaitu Kecamatan, Bejen, Tretep, Wonobojo, Candiroto, dan Juno.
 - 5 Hermawan Kuswantoko
Perencanaan Sekolah Penerbangan di Kabupaten Kulon Progo

Perencanaan sekolah penerbangan di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipandang tepat karena akan menjadi lokasi dibangunnya bandar udara internasional. Masyarakat sekitar lokasi ini dapat menjadi peserta didik dari sekolah penerbangan di daerahnya, dan bekerja di bandara ini.
 - 6 Sentot Catur Pamungkas. *Pemetaan Anak Berkebutuhan Khusus sebagai Dasar Acuan Pembangunan SLB di Kabupaten Sukoharjo*

Pendirian Sekolah Luar Biasa yang baru dapat dilakukan di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo. Hal ini karena sesuai prinsip-prinsip penentuan lokasi.

 1. Jangkauan pelayanan terletak di jalan raya penghubung antara Kabupaten Wonogiri dan Solo, sehingga aksesibilitas dan transportasi terjamin dan mudah ditemui. Selain itu daerah ini juga terjangkau dari daerah Kecamatan Wer dan Bulu yang belum terlayani oleh SLB yang telah ada.
 2. Pola distribusinya merupakan pusat ekonomi, akan tetapi masih tersedia cukup lahan untuk pembangunan serta pengembangan SLB tanpa mengganggu lahan lainnya.
 3. Kondisi tapak sangat kondusif untuk proses belajar mengajar karena sudah berkembang dan tertata rapi terutama Kecamatan Nguter bagian selatan sebagai daerah ideal karena kompleks sekolah-sekolah.
 - 7 Toffan Hussein Widiyarmoko
Pemanfaatan Peta dan Foto Kawasan Karst Sekitar Sekolah sebagai Media Pembelajaran di
 1. Media pembelajaran geografi berupa peta dan foto kawasan karst sekitar sekolah menjadikan siswa dapat menjelaskan materi geografi meliputi pengertian bentuk muka bumi, asal tenaga endogen yang mengubah bentuk muka bumi, tenaga eksogen yang mengubah bentuk muka bumi, potensi alam daerah, dan bentuk kerusakan alam.

- SMP Negeri 1 Ponjong
Gunungkidul Daerah
Istimewa Yogyakarta*
- Standar kompetensi dan kompetensi dasar materi geografi dapat dicapai dengan baik dengan memanfaatkan alam *karst* yang ada di lingkungan siswa tersebut.
- Media pembelajaran geografi berupa peta dan foto kawasan *karst* sekitar sekolah menumbuhkan kreativitas dan rasa keingintahuan siswa, siswa tidak mengantuk, suasana kelas hidup dan interaktif, dan geografi tidak terkesan sebagai pelajaran hafalan.
- 8 Saras Nur Khasanah
*Jangkauan Pelayanan
SMA Negeri 1
Bandongan sebagai
Fasilitas Pendidikan
Menengah di
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang*
- Berdasarkan teori tempat pusat, jangkauan pelayanan SMA Negeri 1 Bandongan sudah menjangkau wilayah di kecamatan setempat bahkan sampai keluar kecamatan. Radius jangkauannya mencapai 9 km karena transportasi dan jaringan jalan menuju ke lokasi sekolah mudah dan lancar. Beberapa kecamatan asal siswa di antaranya dari Kota Magelang, Kecamatan Kaliangkrik, Tempuran, Secang, Windusari.
 - Kondisi pendidikan SMA di Kecamatan Bandongan sebagai berikut, daya tampung siswa melebihi kapasitas, APK rendah, APM rendah, angka melanjutkan terus meningkat, jangkauan pelayanan yang menjangkau sampai keluar wilayah. Hal ini dapat dijadikan rekomendasi untuk menambah ruang kelas baru (RKB) atau Unit Sekolah Baru (USB).
 - Unit Sekolah SMA baru dapat didirikan di wilayah Kecamatan Bandongan dengan pertimbangan faktor jumlah penduduk, lulusan SMP yang belum tertampung, topografi, permukaan jalan luas, dan jalur angkutan umum utama.
- 9 Khodijah
*Program Perencanaan
Strategis Pendidikan di
Kabupaten Bangka*
- Isu-isu strategis yang dipertimbangkan dalam perencanaan strategis pendidikan di Kabupaten Bangka di antaranya. *Pertama*, kesenjangan mutu lulusan antar kawasan dan antar kelompok masyarakat. *Kedua*, dampak globalisasi dan keragaman tuntutan masyarakat belum sepenuhnya teratasi dalam pembangunan pendidikan. *Ketiga*, pendidikan masih terlalu mahal bagi kelompok kurang mampu. *Keempat*, fasilitas pendidikan jenjang pendidikan menengah belum merata. *Kelima*, kualitas pendidikan relatif masih rendah belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. *Keenam*, pendidikan belum menghasilkan lulusan yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan kewirausahaan. *Ketujuh*, desentralisasi dan otonomi pendidikan serta satuan pendidikan belum memenuhi kebutuhan dan harapan semua masyarakat. *Kedelapan*, kualitas profesional tenaga kependidikan masih rendah akibatnya kecil sekali persentase guru yang lulus uji sertifikasi. *Kesembilan*, kesadaran masyarakat untuk bersekolah masih rendah. Ini tergambar dari masih kecilnya APK dan APM pada jenjang SMP dan SMA. *Kesepuluh*, masih kurangnya tenaga kependidikan untuk daerah dan bidang studi tertentu, sehingga banyak guru honorer yang belum layak untuk mengajar dan tidak sesuai kompetensinya. *Kesebelas*, tingginya biaya hidup di Kabupaten Bangka

yang menyebabkan tingginya biaya transportasi menuju sekolah dan banyak siswa putus sekolah karena faktor ini. *Kedua belas*, rendahnya etos kerja tenaga pendidik di beberapa sekolah yang mengakibatkan pelayanan kepada siswa kurang maksimal.

2. Rencana strategis pendidikan Kabupaten Bangka, memiliki visi “Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas, Inovatif, Produktif dan Berakhlak Mulia.” Misi, *pertama*, mengupayakan perluasan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. *Kedua*, mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. *Ketiga*, meningkatkan kesejahteraan, profesionalisme, mutu pendidik dan tenaga kependidikan. *Keempat*, menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar. *Kelima*, meningkatkan manajemen pelayanan pendidikan. *Keenam*, meningkatkan budaya baca dan pengembangan perpustakaan. *Ketujuh*, meningkatkan pembinaan seni dan budaya. *Kedelapan*, meningkatkan pembinaan pendidikan luar sekolah, keolahragaan dan partisipasi pemuda.

- | | |
|---|---|
| <p>10 Bekti Kurnia Rakhmi
<i>Persebaran Kualitas SMA di Kabupaten Tegal Berdasarkan Akreditasi Sekolah</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 15 SMA yang berstatus Negeri dan 25 SMA berstatus swasta. SMA yang terakreditasi hanya 21 sekolah baik Negeri maupun swasta. Sisanya 19 SMA belum terakreditasi. Persebaran akreditasi SMA di Kabupaten Tegal belum benar-benar merata. 2. Terdapat sembilan SMA terakreditasi A, sembilan SMA terakreditasi B, dan satu SMA terakreditasi C. Sehingga rata-rata akreditasi SMA di Kabupaten Tegal adalah B. |
| <p>11 Deanesia Costari Solid Hartanti
<i>School Mapping: Analisis Kualitas SMAN 2 Wonosari dengan Analisis SWOT</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terletak di pinggir jalan raya sehingga tingkat aksesibilitasnya tinggi dan tingkat minat masuk ke sekolah ini juga tinggi. Suara bising yang dapat mengganggu proses kegiatan belajar mengajar, maka pembangunan kelas dibangun di bagian belakang untuk meminimalisasi kebisingan. 2. Bangunan yang tampak dari luar tampak megah sehingga membuat sekolah ini terlihat sekolah yang bonafid. 3. Banyaknya prestasi yang telah diraih SMAN 2 Wonosari sehingga sekolah ini dikenali oleh masyarakat akan prestasinya. 4. Adanya sekolah lain yang memiliki kualitas yang lebih baik merupakan hambatan bagi SMAN 2 Wonosari untuk menjadi sekolah yang bisa menjadi pilihan nomor satu. 5. Memanfaatkan internet untuk mempromosikan sekolah dengan adanya prestasi yang telah diperoleh. 6. Meningkatkan pengelolaan sekolah yang tepat sehingga dapat menghasilkan kualitas sekolah yang baik. 7. Luas wilayah sekolah yang tidak terlalu besar sehingga tidak memungkinkan lagi untuk menambah jumlah kelas ataupun untuk membangun fasilitas yang lain seperti lapangan bola atau fasilitas lainnya. Namun hal ini dapat dibantu oleh lokasi yang strategis, jadi walaupun sekolah ini tidak terlalu luas namun lokasinya strategis sehingga mudah dijangkau. Pembangunan kelas masih dapat dilakukan perluasan secara vertikal. |

8. Meningkatkan prestasi sekolah untuk menarik minat calon peserta didik.
- 12 Nurul Khassanah
Kurnia Putri
Polemik Sekolah yang Menyandang Status RSBI pada Tingkat SMA dan SMK di Provinsi Jambi
1. RSBI SMKN 3 Jambi terjerat kasus korupsi.
 2. SMAN 1 Jambi dan SMAN 3 Kota Jambi yang berstatus RSBI terancam dicabut.
 3. Setelah dua tahun menyandang RSBI, belum terdapat perubahan baik dalam pembangunan sekolah, penyediaan sarana dan prasarana maupun pembinaan terhadap guru.
- 13 Kurniawan
Penyusunan Sistem Informasi Pendidikan SMA Sederajat Berbasis Sistem Informasi Geografi di Kabupaten Bantul
1. Kadaan geografis Kabupaten Bantul yang mempunyai luas 508,85 km² dengan 17 kecamatan mempunyai 79 sekolah setingkat SMA sederajat dengan lokasi tersebar menyeluruh. Persebaran tidak merata di setiap kecamatan karena jumlah penduduk di setiap kecamatan berbeda-beda.
 2. Sistem Informasi Geografi dapat dijadikan acuan dinas terkait agar ketika masyarakat yang ingin menggunakannya dapat mudah untuk mengakses dan menggunakannya.
- 14 Erin Wahyuni
Pemanfaatan Software Sistem Informasi Geografi dalam School Mapping dan Perencanaan Pendidikan
1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan.
 2. Peningkatan mutu pendidikan.
 3. Perencanaan pendidikan yang mengait dengan pengembangan wilayah.
 4. Kegiatan evaluasi dan monitoring pendidikan.
 5. Sisten Informasi Geografi sebagai alat pemersatu bangsa.
- 15 Wulan Praptiwi
Homeschooling Sebagai Solusi Pendidikan di Daerah Terpencil
1. Kegiatan pendidikan alternatif *homeschooling* sangat cocok untuk anak yang putus sekolah, keluarga miskin dan anak-anak di daerah terpencil.
 2. Model-model *homeschooling* yang mempermudah pendidikan di daerah terpencil adalah *distance learning homeschooling*, *homeschooling keliling*, dan *homeschooling* model komunitas pendampingan.
- 16 Lathifah Al Hakimi
Evaluasi Distribusi Perolehan Prestasi Olimpiade Sains Nasional Bidang Kebumian di Indonesia
- Olimpiade Sains Nasional Bidang Kebumian telah diselenggarakan sejak tahun 2008. Setiap tahunnya mencetak tiga puluh peraih medali yang akan dibina dan disaring lagi untuk menuju tingkat internasional. Namun terdapat kekurangmerataan perolehan prestasi Olimpiade Sains Nasional Bidang Kebumian antara daerah satu dengan daerah yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :
1. Perbedaan jumlah peserta yang mampu lolos di tingkat provinsi
 2. Perbedaan fasilitas pembelajaran antara daerah satu dengan daerah yang lainnya
 3. Perbedaan pendidik antara daerah satu dengan daerah lainnya
 4. Perbedaan antara daerah satu dengan daerah lainnya
 5. Perbedaan kebijakan dan perhatian sekolah terhadap Olimpiade Sains Nasional Bidang Kebumian

- 17 Rizky Mandasari
Peningkatan Minat terhadap SMK di Bidang Perikanan dan Pelayaran
1. SMK perikanan dan pelayaran dapat mengurangi pengangguran karena menyiapkan siswanya untuk kerja.
 2. SMK perikanan dan pelayaran dapat meningkatkan perekonomian di daerah maritim dengan melaksanakan praktikum ataupun penjualan makanan di dekat sekolah.
 3. Untuk meningkatkan minat terhadap SMK perikanan dan pelayaran harus dilakukan hal-hal berikut. *Pertama*, meningkatkan aksesibilitas menuju sekolah dan tempat praktikum. *Kedua*, meningkatkan jumlah transportasi menuju sekolah. *Ketiga*, menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi serta kurang mampu. *Keempat*, menerapkan sistem pencarian kerja oleh sekolah agar nantinya siswa sudah terarah ke mana ia bekerja. *Kelima*, menyediakan asrama bagi siswa yang rumahnya sangat jauh dari sekolah.
- 18 Yasika Ninda Widianti
Hubungan antara Faktor Lingkungan Belajar dengan Tingkat Prestasi Belajar Siswa
- Prestasi belajar di sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh giatnya anak-anak belajar, tetapi juga kondisi lingkungan sekolahnya. Lingkungan yang nyaman dan bersih mendukung tumbuh kembang anak optimal. Keterbukaan dan kerja sama antara pihak orang tua dengan sekolah serta pengajar atau tenaga profesional yang membantu (psikolog, terapis, dll).
- 19 Wiwit Widiyani
Program Perencanaan Strategi Pendidikan yang Efektif di SMAN 1 Mertoyudan
- Strategi yang digunakan meliputi, *pertama*, mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. *Kedua*, meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bermutu. *Ketiga*, meningkatkan manajemen pelayanan pendidikan. *Keempat*, meningkatkan budaya baca dan pengembangan perpustakaan.
- 20 Latif Setyawan
Rencana Pengembangan Kawasan di Sekitar Lingkungan Sekolah SMAN 1 Klirong Daerah Kabupaten Kebumen
1. Berbagai kegiatan di sekitar lokasi sekolah bermunculan, seperti kos-kosan, tempat makan, percetakan, toko, warnet, *game online*, dll. Kemunculan berbagai macam tempat ini perlu diadakan pengaturan dan pengawasan karena bersifat positif dan negatif.
 2. Sekolah perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk membuat peraturan tentang pendirian bangunan.
 3. Sekolah perlu meningkatkan berbagai fasilitas yang lengkap agar siswa lebih betah di sekolah dan menghindarkan efek negatif lingkungan luar.
- 21 Bening Nurmaningsih
Pemanfaatan Aplikasi SIG untuk Mengetahui Keterlaksanaan KTSP sebagai Bentuk Pemetaan Sekolah (School Mapping)
- Proses pemanfaatan aplikasi SIG untuk mengetahui keterlaksanaan KTSP adalah sebagai berikut. *Pertama*, memasukkan data sekolah yang menerapkan KTSP. Terdiri dari proses akuisisi data sekolah yang menerapkan KTSP, editing data digitasi sekolah yang menerapkan KTSP, pembangunan topologi data, pemberian atribut, dan transformasi koordinat. *Kedua*, mengelola data sekolah menerapkan KTSP. Terdiri dari pengarsipan dan pemodelan. *Ketiga*, memanipulasi data dan menganalisis data. Terdiri dari *buffering*, *scoring*, dan *overlay*. *Keempat*, keluaran data. Terdiri dari *layout* dan penataan data.
- 22 Asti Wijayanti
- Memperbaiki kondisi pendidikan di daerah terpencil Indonesia

- School Mapping dan Pendidikan di Daerah Terpencil*
- dilakukan dengan dengan cara berikut. *Pertama*, pengadaan dan penempatan guru. *Kedua*, pengelolaan pendidikan melalui parat terdekat dengan lokasi. *Ketiga*, pelaksanaan kurikulum yang sarat dengan muatan lokal. *Keempat*, keterkaitan dengan sektor-sektor lain secara terpadu. *Kelima*, pembangunan sarana dan prasarana yang memadahi.
- 23 Dian Saputra
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
1. Permasalahan khusus dalam pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, mahalny biaya pendidikan.
 2. Program peningkatan mutu harus berorientasi kepada kebutuhan/harapan pelanggan, maka layanan pendidikan suatu lembaga haruslah memperhatikan masing-masing pelanggan.
- 24 Rian Armita
Analisis Strategi Efektif dalam Pengembangan Pendidikan Sekolah Luar Biasa
1. Pengembangan SLB masih perlu disempurnakan meski sudah menunjukkan peningkatan.
 2. Strategi efektif pengembangan SLB meliputi, *pertama*, penataan kurikulum yang lebih *valid, reliable, dan flexible*. *Kedua*, adanya kebijakan sekolah yang mendukung terhadap pengembangan SLB yang ideal. *Ketiga*, pembinaan profesionalisme ketenagaan di SLB. *Keempat*, pemenuhan sarana dan prasaran sesuai dengan yang diperlukan. *Kelima*, dilakukannya manajemen SLB yang efektif.
- 25 Fajrin Abdurrahman
Pemetaan Tingkat Pencapaian Mutu Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi DIY
1. Rata-rata jumlah pengelola-pendidik PAUD sangat bervariasi, tetapi rata-rata empat orang. Kualifikasi pendidikan formalnya dari berbagai disiplin ilmu dengan jenjang S2 sebanyak 5%, S1 sebanyak 56%, dan D2 sebanyak 5%, dan SMA sebanyak 34%. Di antaranya belum pernah mengikuti pelatihan kepaudan.
 2. Rasio pendidik pengasuh peserta didik adalah 1:15 dan belum sesuai acuan.
 3. Evaluasi program dilaksanakan 1-2 kali setahun.
 4. Evaluasi pembelajaran dilakukan setiap cwtur wulan maupun harian.
 5. Pencapaian mutu PAUD di Kota Yogyakarta cenderung lebih baik dibanding kabupaten di sekitarnya, terutama dalam tenaga kependidikan.
 6. Faktor pendukung tercapainya mutu program PAUD adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD, sehingga mereka tidak keberatan menitipkan anaknya pada TPA maupun KB. Serta didukung oleh gencarnya pemerintah menyosialisasikan PAUD melalui dinas pendidikan.
- 26 Kukuh Eko Wibowo
Proses Akreditasi Sekolah/Madrasah
1. Akreditasi sangat diperlukan untuk peningkatan mutu sekolah sehingga tercipta output yang berkualitas.
 2. Masalah dana masih menjadi masalah utama sukses tidaknya proses akreditasi.
 3. Proses akreditasi belum seluruhnya menjangkau seluruh sekolah/madrasah di Indonesia, terutama

- sekolah/madrasah di daerah terpencil.
4. Proses akreditasi terlalu panjang dan berbelit-belit.
 5. Proses akreditasi masih menggunakan cara manual.
- 27 Muflih Priatno
School Mapping: Perencanaan Organisasi dan Kegiatan Sekolah yang Efektif
- Analisis lingkungan eksternal dan internal sekolah untuk perencanaan sekolah terdiri dari, *Kekuatan*, perhatian pemerintah sudah tinggi terhadap pendidikan; adanya kepedulian masyarakat terhadap pendidikan; dan kemudahan dalam komunikasi. *Kelemahan*, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan; keterbatasan anggaran pendidikan; kualitas profesional tenaga kependidikan masih rendah; dan kesadaran untuk bersekolah masih rendah. *Peluang*, adanya otonomi daerah; akses ke pusat dan provinsi; dan adanya dukungan sumber daya pendidikan. *Ancaman*, apresiasi sebagai masyarakat terhadap pendidikan belum memadai; kekurangan tenaga pendidik pada semua jenjang pendidikan; menurunnya etos kerja guru; dan pengaruh budaya hidup yang merusak dari luar daerah.
- 28 Defie Yopi Rambang
Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Sekolah
- Pelibatan komite sekolah secara aktif dalam pembuatan RPS dan RAPBS memiliki dampak yang sangat luas. *Pertama*, komite sekolah mengetahui secara pasti arah program sekolah. *Kedua*, komite sekolah mengetahui permasalahan yang dihadapi sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. *Ketiga*, komite sekolah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk membantu mengatasi masalah secara proporsional. *Keempat*, komite sekolah memiliki rasa keterikatan yang makin kuat dengan sekolah.
- 29 Arini Susanti
Aksesibilitas di SMAN 4 Lahat sebagai Rintisan Sekolah Beraraf Internasional
1. Akses jalan menuju SMAN 4 Lahat sempit dan melintasi perkebunan dan berbatasan dengan hutan dan persawahan yang dihuni monyet-monyet liar.
 2. Aksesibilitas menuju SMAN 4 Lahat secara tidak langsung memiliki andil pengaruh terhadap proses belajar.
 3. Fasilitas pendidikan yang lengkap. Siswa yang berkualitas, organisasi sekolah yang baik, dan tenaga pendidik yang kompeten mendukung kemajuan prestasi siswa SMAN 4 Lahat.
- 30 Melinda Ayu
Standar Kompetensi Guru di Daerah Terpencil
1. Guru-guru di daerah terpencil masih banyak yang belum bisa membuat rencana pelaksanaan pembelajaran.
 2. Sertifikasi merupakan salah satu program untuk meningkatkan standar kompetensi guru.
 3. Program SM-3T dan Indonesia Mengajar sangat membantu dalam pendistribusian guru di daerah terpencil.
- 31 Tio Weni Purnama
Perkembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Pelosok di Kabupaten Banyuasin
1. Pendirian SD dan SMP satu atap merupakan solusi agar anak di daerah pelosok dapat terlayani pendidikannya sehingga mengurangi anak yang putus sekolah.
 2. Pemerintah daerah harus menambah guru di daerah pelosok yang masuk dalam kategori sangat kurang guru.
- 32 Aulia Istiqomah
Perbedaan Pendidikan di Perkotaan dan
1. Pendidikan pada masyarakat perkotaan sangat maju dan dapat berkembang dengan pesat. Fasilitas yang memadai dan menunjang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan

- Pedesaan*
- proses pendidikan yang terjadi.
2. Kondisi pendidikan di pedesaan sangat memprihatinkan. Bangunan sekolah banyak yang sudah tua dan rapuh. Aksesibilitas sulit dijangkau dan jauh.
 3. Penyebab terjadinya ketimpangan pendidikan di pedesaan dan perkotaan adalah sebagai berikut. *Pertama*, sarana dan prasarana. *Kedua*, aksesibilitas. *Ketiga*, tenaga ahli dalam hal ini guru. *Keempat*, kondisi ekonomi.
- 33 Faqih Shofan Mufti
Pemetaan Sistem Pendidikan terhadap Prospek Dunia Kerja di SMKN 1 Wanareja Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap
1. Kondisi SMKN 1 Wanareja belum memiliki standar yang baik dalam hal peningkatan pembelajaran.
 2. SMKN 1 Wanareja masih belum memadai dalam hal sarana prasarana. Tempat parkir belum sepadan dengan jumlah kendaraan. Belum tersedianya kantin sekolah. Perpustakaan belum memiliki koleksi buku baru.
- 34 Larostina Saputri
Penerapan Kurikulum Mitigasi Bencana pada Sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta
1. Pendidikan kebencanaan sangat penting untuk memberikan pemahaman dini dan penyiapan diri apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam.
 2. Pengenalan lingkungan potensi bencana di Yogyakarta seperti gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor
- 35 Aris Sulistiyo Wibowo
Pemanfaatan Teori Lokasi, Teori Pelayanan dan Teori Pendidikan dalam Perencanaan Pendidikan Dasar di Kecamatan Karangasambung
1. Letak sekolah dalam suatu lokasi optimal adalah berlokasi terbaik secara ekonomis dengan cara meminimalkan biaya transportasi.
 2. Upaya yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah perluasan kesempatan dan pemerataan pendidikan serta peningkatan mutunya adalah berikut ini. *Pertama*, penambahan tenaga pendidik berkualitas. *Kedua*, pembangunan prasarana penunjang. *Ketiga*, pembangunan unit sekolah baru. *Keempat*, perbaikan jalan.
 3. Meski sekolah gratis melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tetapi angka putus sekolah di tingkat dasar masih tinggi. Penyebabnya antara lain, *pertama*, letak sekolah yang susah diakses dan ditempuh, serta butuh biaya tinggi dalam hal transportasi. *Kedua*, kurangnya fasilitas pendukung seperti bangku, meja, papan tulis, peralatan praktik dan laboratorium. *Ketiga*, kurangnya mutu tenaga pendidik. *Keempat*, faktor ekonomi keluarga. Banyak siswa yang harus membantu ekonomi keluarga sehingga mengorbankan pendidikannya.
- 36 Sumarti
Pengaruh Lokasi Strategis untuk Pembangunan SMK Guna Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Mengurangi Angka Pengangguran Penduduk di Pedesaan
1. Lokasi yang dipilih untuk pembangunan sekolah di pedesaan harus berada di pedesaan yang mudah untuk dijangkau, persediaan airnya mencukupi dan mempunyai tanah yang luas.
 2. Faktor-faktor pendukung pembangunan SMK di pedesaan adalah berikut ini. *Pertama*, meningkatnya migrasi yang terjadi di pedesaan. *Kedua*, kurangnya pengetahuan dan jiwa *skill* yang dimiliki oleh generasi muda. *Ketiga*, banyaknya sumber daya alam yang tidak dimanfaatkan oleh penduduk pedesaan. *Keempat*, faktor lokasi. *Kelima*, meningkatkan aksesibilitas.
 3. Manfaat pembangunan SMK di pedesaan, yaitu *pertama*,

siswa dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada saat menuntut ilmu pendidikan dan secara langsung dapat membuktikannya dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, siswa yang sudah selesai masa pendidikan di sekolahnya dapat langsung memiliki pekerjaan. *Ketiga*, menambah pengetahuan masyarakat akan kemajuan teknologi yang ada di desa. *Keempat*, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 37 Yayang Fajar Pradhesta
Analisis Jumlah Siswa Putus Sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010
1. Faktor yang menyebabkan putus sekolah adalah *pertama*, latar belakang pendidikan orang tua. *Kedua*, lemahnya ekonomi keluarga. *Ketiga*, kurangnya minat anak untuk bersekolah. *Keempat*, kondisi lingkungan tempat tinggal anak. *Kelima*, pandangan masyarakat terhadap pendidikan.
 2. Dampak yang terjadi akibat putus sekolah adalah banyaknya penganguaran dan tindakan kriminalitas.
 3. Angka putus sekolah tertinggi ditemukan di Kabupaten Gunungkidul sejumlah 164 siswa yang disebabkan oleh faktor fisik maupun non fisik yang kurang mendukung.
 4. Angka putus sekolah terendah ditemukan di Kota Yogyakarta sejumlah 65 siswa yang disebabkan oleh faktor fisik maupun non fisik yang kurang mendukung.
 5. Pengurangan angka putus sekolah harus dilakukan dengan mengondisikan lingkungan, memberikan bimbingan psikologi akan pentingnya sekolah, dan meningkatkan beasiswa.
- 38 Tina Handriani
Penentuan Lokasi dalam Pembangunan Sekolah serta Evaluasi Letak Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ngawi
- Persebaran Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ngawi cukup merata di seluruh kecamatan. Tetapi ada beberapa masalah di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Geneng, Kasreman, Ngrambe, dan Kedunggaalar. Permasalahan yang terjadi adalah banyaknya anak usia sekolah tetapi tidak didukung oleh jumlah sekolah yang mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan sesuai usia sekolahnya. Selain itu rendahnya tingkat angka partisipasi sekolah.
- 39 Murika Wulandari
Peta Sekolah SMK Negeri 1 Pandak Bantul Berdasarkan Peninjauan terhadap Analisis Permasalahan Belajar Siswa
1. Lokasi sekolah berada di daerah bergunung-gunung mengakibatkan aksesibilitas menuju sekolah ini relatif sulit.
 2. Aksesibilitas yang relatif sulit menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan belajar siswa.
 3. Permasalahan belajar yang dialami sebagian besar berkisar tentang masalah prestasi belajar, dan yang lainnya adalah tingginya kehamilan di luar nikah.
- 40 Amad Chasan Asngari
Evaluasi Geografis Sederhana Pembangunan Madrasah Aliyah Ma'arif di Desa Megulung Kidul Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo
- Kondisi empiris Madrasah Aliyah Ma'arif Pituruh, *pertama*, lokasi kurang strategis karena tidak terlihat dari akses utama jalan kecamatan (jalur utara penghubung antara Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Kebumen) meskipun aksesibilitasnya cukup baik (jarak, waktu tempuh dan moda). *Kedua*, satuan lahan merupakan lahan pekarangan, bukan lahan produktif. *Ketiga*, batas geografis di sekelilingnya adalah sawah dan pemukiman penduduk. *Keempat*, unit geologis merupakan satuan lempeng eurasia. *Kelima*, kondisi demografi rata-rata anggota keluarga rumah tangga yaitu 3,6, artinya

setiap keluarga memiliki satu sampai dua anak yang membutuhkan pendidikan. *Keenam*, jaringan transportasi terdapat sarana moda angkutan KOPADA, becak dan ojek. *Ketujuh*, perkembangan pemukiman penduduk terutama untuk usaha dan bisnis.

- | | | |
|----|---|--|
| 41 | <p>Afza Afgani Setiawan
<i>School Mapping SD, SMP, dan SMA di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah</i> Dilihat dari Aspek Lokasi (Location) dan Zona Bencana (Disaster Zone)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari jumlah SD/ sederajat sebanyak 28 sekolah, sembilan di antaranya masuk daerah/zona rawan gas beracun, dan lima sekolah masuk daerah/zona rawan tanah longsor. 2. Dari jumlah SMP/ sederajat sebanyak tiga sekolah, satu di antaranya masuk daerah/zona rawan gas beracun. 3. Satu-satunya SMA di Kecamatan Batur, relatif aman dan tidak termasuk ke dalam daerah/zona rawan gas beracun maupun tanah longsor. |
| 42 | <p>Sujarwo
<i>Pemetaan Perencanaan Pembangunan Sekolah Dasar</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi permasalahan keterjangkauan sekolah dsar oleh siswa usia sekolah di Desa Bina Amarta Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan yang disebabkan oleh terlalu luasnya wilayah desa yang tidak sebanding dengan jumlah sekolah, serta tersebaranya tempat tinggal penduduk di wilayah tersebut. 2. Penambahan jumlah bangunan sekolah dasar dari dua menjadi empat agar sekolah lebih mudah dijangkau oleh siswa. 3. Perencanaan yang sesuai untuk pembangunan sekolah adalah dengan membangun sekolah yang berlokasi di dekat rumah penduduk sekitar. |
| 43 | <p>Hassan Rifai
<i>Pemetaan Anak Tidak Sekolah dan Putus Sekolah Usia 7-15 Tahun di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NTB (2007): Ke Arah Penuntasan Wajar 9 Tahun</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka putus sekolah di Kota Mataram berjumlah 1136 orang anak. Paling banyak di Kecamatan Cakranegara (242), Selaparan (223), Mataram (210), Ampenan (194), dan Sandubaya (160). 2. Angka putus sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah 569 orang anak. Paling banyak di Kecamatan Taliwang (177), Seteluk (163), Brang Rea (93), Jereweh (73) dan Sekongkang (63). 3. Faktor penentu putus sekolah di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat adalah ekonomi, minat anak kurang, perhatian orang tua kurang, fasilitas belajar kurang, budaya, dan cacat. |
| 44 | <p>Aziz Fahmi Hertami
<i>"SMA Bantul Boarding School" Keniscayaan Zaman Kini dalam Menghadapi Heterogenitas Lingkungan Sosial yang Tidak Kondusif.</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Boarding School</i> sangat cocok diwujudkan di Kabupaten Bantul untuk mempersiapkan generasi penerus yang memiliki jiwa pemimpin sejati yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan dengan bekal ilmu yang memadai disertai dengan keterampilan dan kecakapan hidup. 2. Lokasi <i>Boarding School</i> sangat tepat didirikan di Kota Bantul sebagai ibukota kabupaten. Selain karena lokasinya |

- yang berada di tangan, Kota Bantul jaraknya relatif jauh dari Kota Yogyakarta. Meskipun hanya sepuluh menit dari Yogyakarta, namun nuansa heterogenitas dan hedonism Kota Yogyakarta sudah mulai tidak terasa. Dengan demikian diharapkan tercipta suasana belajar yang kondusif bagi anak-anak didik.
- 45 Fajar Agung Nugroho
Pemetaan Sekolah dalam Perencanaan Model Sekolah Vokasi Berbasis Potensi Lokal di Daerah Pesisir Bantul
- Mayoritas pendidikan terakhir penduduk daerah pesisir adalah SMP. Perlu dilanjutkan bisa langsung ke SMK karena mendapat praktik lapangan dan dikhususkan kerja yang berhubungan dengan daerah asal berpotensi alam laut.
- 46 Dede Setyowati
SMK Pertanian Sebagai Salah Satu Upaya Memaksimalkan Pendayagunaan Penggerak Ekonomi Kerakyatan di Kulon Progo
1. Faktor penyebab minimnya SMK pertanian di Kulon Progo adalah berikut, *Pertama*, kondisi geografis Kabupaten Kulon Progo yang berbukit-bukit. Sebaran penduduk dan pusat pertumbuhan yang berpencar. *Kedua*, minimnya tenaga kependidikan dalam bidang pertanian. *Ketiga*, sedikitnya peminat untuk memasuki SMK pertanian.
 2. Solusi untuk mengembangkan SMK pertanian di Kulon Progo dilakukan dengan cara berikut. *Pertama*, peminat SMK pertanian diberikan beasiswa. *Kedua*, memperbanyak SMK pertanian di Kabupaten Kulon Progo.
 3. Prediksi SMK pertanian di masa depan adalah berpengaruh positif terhadap pertanian di Kulon Progo.
- 47 Wahyu Mardiyanto
Optimalisasi SMK Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Purworejo
1. Faktor-faktor pendorong didirikannya SMK kelautan dan perikanan di Kabupaten Purworejo adalah, *pertama*, kondisi geografis yang berbatasan dengan Samudera Hindia di bagian selatan. *Kedua*, belum adanya SMK kelautan dan perikanan di Kabupaten Purworejo.
 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sedikitnya peminat SMK kelautan dan perikanan di Kabupaten Purworejo adalah *pertama*, kalah populer dengan SMA. *Kedua*, biaya pendidikan di SMK relatif lebih mahal. *Ketiga*, kurangnya sosialisasi dari pemerintah maupun sekolah. *Keempat*, sarana dan prasarana yang masih kurang.
 3. Upaya untuk mengembangkan SMK kelautan dan perikanan di Kabupaten Purworejo adalah berikut, *pertama*, memberikan fasilitas yang lengkap guna menunjang proses pembelajaran. *Kedua*, adanya sosialisasi dari pemerintah maupun pihak sekolah tentang kelebihan dari SMK kelautan dan perikanan. *Ketiga*, pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi. *Keempat*, adanya penyaluran kerja setelah lulus dari sekolah kelautan dan perikanan.
 4. Menambah SMK kelautan dan perikanan di Kabupaten Purworejo.
- 48 Isti Mandira
Penentuan Lokasi Sekolah di Daerah Terpencil di Kabupaten Karanganyar
- Penentuan lokasi sekolah SD-SMP satu atap di Kabupaten Karanganyar diidentifikasi dengan tiga variabel, yaitu *pertama*, ketersediaan dan kebutuhan sarana pendidikan. *Kedua*, karakteristik penduduk terhadap partisipasi pendidikan dan persebaran pengguna sarana pendidikan. *Ketiga*, aksesibilitas

penduduk terhadap pelayanan sarana pendidikan.

- 49 Chika Novriani
Persebaran Buku Sekolah di Indonesia
1. Dalam mengaji persebaran buku sekolah di Indonesia dapat digunakan tiga pendekatan geografi, yaitu pendekatan keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah.
 2. Konsep geografi yang berkaitan dengan persebaran atau pemerataan buku sekolah di Indonesia di antaranya yaitu konsep jarak, lokasi, keterjangkauan, dan lain-lain.
 3. Tingkat kepemilikan siswa akan buku pelajaran berkorelasi positif dan signifikan dengan hasil belajar atau prestasi siswa.
 4. Solusi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi ketidakmerataan buku sekolah di Indonesia adalah, *pertama*, menambah kuota atau jumlah buku yang dicetak untuk disebar ke seluruh Indonesia. *Kedua*, melakukan pengawasan untuk menjamin sampainya buku tersebut ke sekolah-sekolah yang membutuhkan, terutama yang berada di pelosok. *Ketiga*, menggalakan aksi sebar buku. *Keempat*, memperbaiki dan meningkatkan sarana transportasi.
- 50 Ratih Nirmalasari
Pendayagunaan Fasilitas Sekolah di Kota Yogyakarta (SMA Negeri 6 dan MAN 1)
1. Secara umum kedua sekolah telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai dan sudah sesuai dengan standar. Meski begitu ada fasilitas yang kurang dimanfaatkan optimal.
 2. Laboratorium IPS di SMAN 6 Yogyakarta masih dalam pembangunan-pengembangan. Sedangkan di MAN 1 Yogyakarta telah ada, meski pemanfaatannya belum optimal.
 3. Ruang perpustakaan di kedua sekolah sudah cukup memadai dan dalam kondisi baik. Namun, buku-buku yang disediakan belum cukup.
-

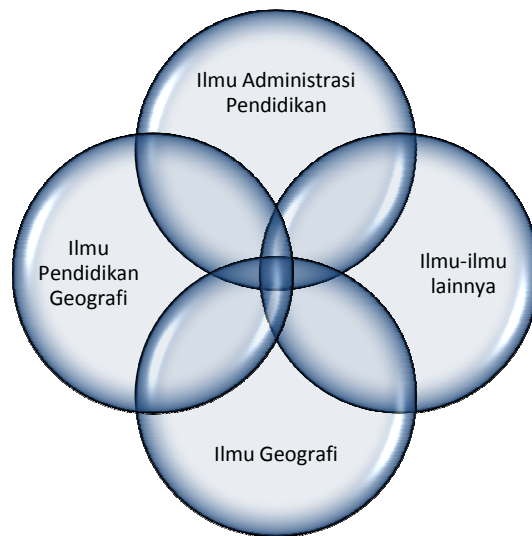
Hasil kajian mandiri mandiri mahasiswa umumnya sudah memenuhi ruang lingkup kajian pemetaan pendidikan. Mereka sudah mampu mendeskripsikan konsep-konsep dasar dari beberapa disiplin ilmu penunjangnya. Hasil penelitian menunjukkan banyaknya analisis mahasiswa yang dapat dipertimbangkan dalam rangka pemecahan masalah pendidikan untuk penguatan manajemen pendidikan nasional untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, mutu, relevansi, kesetaraan, dan kepastian dalam memperoleh layanan pendidikan di Indonesia.

Mahasiswa telah melakukan kajian pemetaan pendidikan dengan berbagai metode penelitian di antaranya kajian pustaka, studi dokumentasi, dan observasi. Beberapa balikan yang disampaikan mahasiswa selama perkuliahan terkait *school mapping* ini, di antaranya adalah sangat minimnya literatur yang tersedia. Meski pada awal perkuliahan, dosen sudah memberikan daftar referensi yang dapat dijadikan rujukan termasuk dari internet. Kiranya memang masih perlu

dikembangkan lebih lanjut kajian pemetaan pendidikan ini sebagai salah satu fokus studi administrasi pendidikan.

Pemetaan Sekolah (*School Mapping*) dan Pemetaan Pendidikan (*Education Mapping*) dalam Keilmuan Administrasi Pendidikan

Administrasi pendidikan dapat dipandang sebagai ilmu terapan yang disokong oleh ilmu-ilmu lain. Keterhubungan administrasi pendidikan dengan ilmu-ilmu lain dapat berupa *interdisciplinary science* ataupun *cross disciplinary science*. Pemetaan pendidikan yang berkembang dari konsep pemetaan sekolah (*school mapping*) merupakan keterhubungan administrasi pendidikan dengan ilmu geografi.



Gambar 1
Hubungan ilmu administrasi pendidikan dengan ilmu geografi dan ilmu-ilmu lainnya

Pemetaan sekolah adalah suatu kegiatan untuk memberikan gambaran atau mungkin secara rinci dan tepat di permukaan suatu daerah tertentu mengenai keadaan sekolah serta hubungannya dengan jumlah anak usia sekolah, perkembangan pemukiman penduduk, sosial ekonomi dan lingkungan dalam arti luas. Tujuan dari pemetaan sekolah antara lain menata jaringan sekolah, meningkatkan mutu pendidikan, dan perencanaan dalam menentukan lokasi sekolah. Contoh penerapan pemetaan sekolah misalnya dalam perencanaan

menentukan lokasi sekolah yang strategis, merupakan langkah awal dalam menciptakan sekolah yang berkualitas. Letak suatu sekolah tentu akan berpengaruh pada kualitas. Kualitas sekolah dan output yang dihasilkan oleh sekolah harus memperhatikan aspek-aspek mudah dijangkau, jauh dari tempat yang ramai, tidak melebihi waktu lima belas menit atau 1,5 km perjalanan, cukup murid, dan tidak bertolak belakang dengan perkembangan pemikiran/primitif. (Sutiman, et al, 2012.; Tina Handriani, 2012).

Penulis mengembangkan konsep pemetaan pendidikan dari konsep pemetaan sekolah. Berbagai aspek pendidikan dalam ruang lingkup sekolah dibawa ke ranah yang lebih luas. Baik dalam hal ruang lingkup kajian maupun luasan wilayah yang dibahas. Pemetaan pendidikan ini mengadopsi dan mengadaptasi konsep pemetaan dari ilmu geografi.

Peta sebagai salah satu bidang kajian geografi digunakan sebagai sarana untuk mengetahui persebaran sesuatu hal dalam bidang pendidikan. Geografi yang dimaksud pun dapat berupa geografi fisik maupun sosial (nonfisik). Geografi fisik dapat digunakan dalam keperluan sistem fasilitas pendidikan. Sistem fasilitas pendidikan bertujuan untuk menyediakan lingkungan fisik yang dapat membantu tercapainya keberhasilan individu dalam proses pembelajaran. (Banghart dan Trull, 1973). Hal ini contohnya dapat digunakan ketika kita hendak menentukan lokasi pendirian sekolah. Geografi sosial dapat digunakan dalam keperluan sistem aktivitas pendidikan, sistem komunikasi pendidikan, dan sistem operasional pendidikan. Contohnya seperti pemetaan tenaga pendidik di suatu wilayah.

Terdapat konsep esensial dan prinsip geografi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pemetaan pendidikan. Geografi pada hakikatnya merupakan studi tentang gejala-gejala yang nyata dalam kehidupan manusia. Gejala geografi yang ada di sekitar kita merupakan hasil keseluruhan interelasi keruangan antara faktor fisis dan nonfisis. Dalam mempelajari geografi terdapat pola nyata dan abstrak. Pola abstrak dalam bentuk pengertian abstraksi disebut konsep. (Gatot Harmanto, 2008: 6).

Konsep esensial geografi meliputi konsep lokasi, konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep pola, konsep morfologi, konsep aglomerasi, konsep nilai

kegunaan, konsep interaksi, konsep diferensiasi areal, dan konsep keterkaitan ruangan. Adapun prinsip geografi merupakan dasar mengkaji dan mengungkapkan gejala masalah geografi di permukaan bumi. Secara teoritis prinsip geografi terdiri dari prinsip penyebaran, prinsip interelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. (Gatot Harmanto, 2008: 7).

Pemetaan Pendidikan Sebagai Dasar Meningkatkan Layanan Pendidikan

Pembuatan kebijakan pendidikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas memerlukan suatu dasar acuan yang jelas. Pemetaan pendidikan dimaksudkan sebagai kondisi nyata yang harus diperbaiki oleh pemegang kebijakan. Memperhatikan konsep perencanaan pendidikan komprehensif dari Banghart dan Trull (1973) paling sedikit ada empat sistem yang mendukung perencanaan pendidikan yang pada gilirannya akan dituangkan sebagai kebijakan. Sistem tersebut meliputi sistem aktivitas pendidikan, sistem komunikasi pendidikan, sistem fasilitas pendidikan, dan sistem operasional pendidikan.

Pemetaan pendidikan dapat dijadikan dasar perencanaan pendidikan. Peran pemetaan sekolah sebagai dasar meningkatkan layanan pendidikan ini juga dikemukakan oleh Departemen Pendidikan Filipina (2012) *“School mapping is a set of techniques and procedures used to plan the demand for schools at the local level and to support decision-making on the planning, policy formulation, resource allocation and prioritization of future school development.”* Jelaslah bahwa pemetaan pendidikan ini dapat digunakan pemegang kebijakan, terlebih-lebih pemerintah daerah, sebagai pendukung pembuatan keputusan dalam perencanaan, perumusan kebijakan, pengalokasian sumber daya, dan pengutamaan pengembangan sekolah untuk masa depan.

Sebagai bagian dari perencanaan pendidikan, pemetaan sekolah dapat dipandang pula sebagai metode perencanaan pendidikan secara mikro yang berupa proses penataan atau penataan kembali jaringan persekolahan yang ada sehingga diperoleh jaringan yang baru dengan daya tampung yang lebih besar. Sumber-sumber yang ada dapat didayagunakan secara optimal. Selanjutnya diusahakan agar mutu pendidikan yang lebih berbobot dan mempunyai relevansi dengan pembangunan. (Sutiman, et al., 2012).

Setidaknya ada sepuluh bidang garapan manajemen pendidikan yang dapat memanfaatkan pemetaan pendidikan sebagai inputnya. Bidang garapan itu meliputi organisasi lembaga pendidikan, manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen personalia pendidikan, manajemen fasilitas pendidikan, manajemen pembiayaan pendidikan, manajemen hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, ketatalaksanaan lembaga pendidikan, kepemimpinan pendidikan dan supervisi pendidikan.

Gagasan penulis nampak senada dengan Steven J. Hite (2008: 5) mengenai penerapan pemetaan sekolah, *“A typical methodology in implementing a SM (School Mapping) process would include steps and considerations like the following:*

1. *The selection of a unit or unit of analysis for the SM exercise.*
2. *A diagnosis of the existing educational situation in the base year.*
 - a. *Existing inequalities in access by impacted area(s) and group(s).*
 - b. *Efficiency issues such as repetition and drop-out rates (wastage).*
 - c. *Disparities in elements impacting quality such as facilities, teachers, equipment and supplies.*
3. *Detailed projection of enrolment demand potential, including definitions of optimal catchment area(s) for the school(s).*
4. *Estimation of numbers and identification of locations where schools are to be opened (and perhaps closed).*
 - a. *Teacher transfers and distribution.*
 - b. *School calendar modifications to increase student participation.*
 - c. *Measures to encourage attendance such as school meals and free school book programmes.*
5. *Estimation of facilities, resources and supplies to be provided in schools.*
6. *Cost estimations*

Mengambil konteks Indonesia, penulis berkeyakinan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dapat mengambil tindakan dengan memanfaatkan konsep-konsep pemetaan pendidikan ini. Pemetaan pendidikan ini berperan dalam penyediaan data dan pendukung pembuatan keputusan.

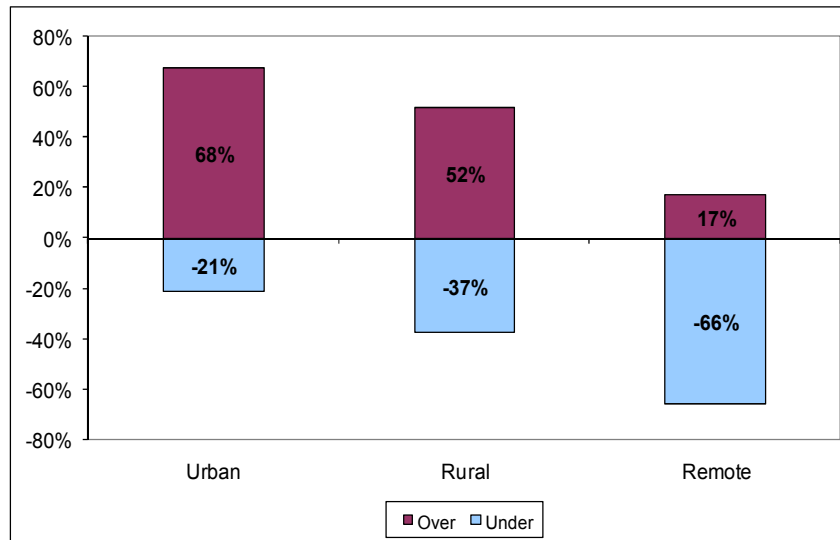


Diagram 1
 Pemetaan Distribusi Guru Indonesia 2008
 Sumber: BPSDMP-PMP Kemdikbud (2011)

Contoh dari pemetaan pendidikan di Indonesia misalnya, menggambarkan distribusi guru yang sangat timpang, sebagian besar masih terkonsentrasi di daerah perkotaan. Baik di kota (52%) maupun perdesaan (68%) mengalami kelebihan guru. Mayoritas sekolah di wilayah terpencil (66%) kekurangan guru. Tantangan yang dihadapi pemerintah adalah meningkatkan pemerataan distribusi guru. Kebijakan pemerintah yang kemudian menindaklanjuti masalah ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani SKB 5 Menteri bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama. SKB ini berisi kesepakatan untuk kerjasama dan memberikan dukungan dalam hal pemantauan, evaluasi, dan kebijakan penataan serta pemerataan guru secara nasional. Contoh ini menunjukkan bahwa pemetaan pendidikan sungguh dapat menjadi dasar untuk meningkatkan pelayanan pendidikan.

PENUTUP

Pemetaan pendidikan (*education mapping*) merupakan pengembangan dari konsep pemetaan sekolah (*school mapping*). Pemetaan pendidikan sebagai dasar pertimbangan pembuatan kebijakan diarahkan untuk meningkatkan layanan

pendidikan. Pemetaan pendidikan berperan penting memberikan data dan informasi pendukung dalam perumusan kebijakan berbasis kewilayahan dan aspek-aspek yang terkait dengan layanan pendidikan. Pemetaan pendidikan memerlukan sumbangan ilmu lain, khususnya geografi dalam keilmuan administrasi pendidikan.

Model perkuliahan kajian mandiri pemetaan pendidikan yang diterapkan pada mahasiswa Pendidikan Geografi berhasil memasukkan unsur-unsur ilmu geografi terhadap administrasi pendidikan. Makalah ini hanya memuat pemikiran dasar dan deskripsi pengalaman perkuliahan penulis sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan. Penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode penelitian yang lebih akurat seperti penelitian tindakan kelas maupun observasi kelas sangat disarankan untuk dilakukan.

Daftar Pustaka

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2011). "Jaringan Penelitian Pendidikan."
<http://litbang.kemdikbud.go.id/detail.php?id=4> diakses 17 Mei 2012 pukul 9.52 WIB.
- Banghart, F.W & Trull. (1973). *Educational Planning*. New York: Macmillan Company
- Department of Education. (2012). *Overview of School Mapping*. MS. Powerpoint.
<http://deped-pfsed.wikispaces.com/School+Mapping> diakses 25 Mei 2012 pukul 15.23 WIB.
- Effendi, Sofian. (2011). Wawancara dalam artikel "Kebijakan Pendidikan Tak Berdasar Riset." Senin, 24-Oct-2011 07:51:28
<http://litbang.kemdikbud.go.id/detail.php?Kebijakan-Pendidikan-Tak-Berdasar&id=251> diakses 17 Mei 2012 pukul 9.59 WIB.
- Handriani, Tina. (2012). *Penentuan Lokasi dalam Pembangunan Sekolah Serta Evaluasi Letak Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ngawi*. Makalah Manajemen Pendidikan Jurusan Pendidikan Geografi FIS UNY.
- Harmanto, Gatot. (2008). *1700 Bank Soal Bimbingan Pemantapan Geografi untuk SMA/MA: Ringkasan Materi X, XI, dan XII*. Bandung: Yrama Widya.

Hasil Rumusan dan Rekomendasi Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Tahun 2012. Yogyakarta, 7-8 Mei 2012.

Hite, Steven J. (2008). *School Mapping and GIS in Education Micro-planning*. Paris: International Institute for Educational Planning

BPSDMP-PMP Kemdikbud. (2011). *Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Guru*. Paparan power point pada Teacher Education Summit. Jakarta, 14 Desember 2011.

Sutiman, et al. (2012). *Pemetaan Sekolah*. Diklat kuliah. Yogyakarta: Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY.